



RENCANA KERJA (RENJA)



**Dinas Perhubungan
Provinsi Maluku**

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami naikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat serta penyertaannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022.

Rencana Kerja merupakan acuan perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan pasal 21 ayat 1 menyebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja – OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Diharapkan penyusunan rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini telah di upayakan sebaik mungkin walaupun tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. atas segala kekurangan dalam penyusunan naskah ini mohon kirannya dimaafkan dan mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Demikian penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan semua pihak yang terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan penyelesaian Rencana Kerja Tahun 2022 dan semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ambon, Maret 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU**



Dr. MOHAMMAD MALAWAT, ST. MT
Pembina Tk. I

NIP. 19721029 199803 1 002

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	23
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	26
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	26
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP.....	28



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan dan penelaahan kebijakan nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku memiliki tugas “Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.”. pada misi Gubernur poin ke empat terkait peningkatan Infrastruktur dan Konektisitas Gugus Pulau.

Tahun Anggaran 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2019- 2024, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maluku Tahun 2019 – 2024;
5. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang - Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Manfaat Perencanaan Kinerja :

- a) Menghubungkan perencanaan strategis, action plan dan perencanaan operasional terinci
- b) Membantu “memastikan” pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan
- c) Memudahkan proses pengukuran kinerja
- d) Membantu monitoring dan evaluasi kinerja

- e) Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang
- f) Memudahkan penetapan spesifikasi kontrak pekerjaan atas dasar capaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal OPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah - kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD**

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mendapat alokasi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.944.963.459,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.837.055.724,- (78,80%), sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.107.907.735,- dan terdapat sembilan (9) program terbagi atas 50 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada Tahun 2020. Capaian pelaksanaan Rencana Kerja dinas secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa layanan dan sarana administrasi yang memadai dan layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor yang di implementasikan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.898.000,- (99,49%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.102.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya bahan dan jasa surat menyurat berupa : 2.250 buah meterai dan benda pos lainnya serta jasa pengiriman surat selama 12 bulan.

Hasil (*Outcome*) :

Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 228.171.259,- (57,04%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 171.828.741,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 1 jaringan listrik, jasa pembuatan website/aplikasi dan 11 jaringan internet (indihome)

Hasil (*Outcome*) :

Tingkat kecukupan pelayanan komunikasi, informasi, listrik

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 206.670.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 202.067.580,- (97,77%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 4.602.420,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 4 orang tenaga kebersihan kantor (cleaning service) selama 1 tahun dan tersedianya bahan peralatan dan bahan pembersih kantor, berupa: 1 buah Vaccum cleaner, 25 buah tempat sampah, 115 botol pembersih lantai, 20 buah kain pel, 35 lembar kain Lap, 85 dos Tissue, 40 botol sabun pembersih tangan, 52 buah kanebo, 40 buah kanfer, 45 buah kemoceng, dan bahan pembersih lainnya.

Hasil (*Outcome*) :

Jangka waktu terjaminnya kebersihan kantor

d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 33.319.500,- (66,64%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 16.680.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Jasa Perbaikan peralatan kerja tersedianya dana untuk perawatan peralatan kantor berupa Ac, Komputer, Laptop, Printer dan Sound system.

Hasil (*Outcome*) :

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas - tugas perkantoran.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 149.265.997,- (99,51%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 734.003,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 450 rim kertas HVS/F4 , 420 rim kertas A4, 160 rim HVS merah muda, 49 dos amplop, 445 botol tinta printer, 100 buah map odner, 190 pak map batik/folio dan alat tulis kantor lainnya.

Hasil (*Outcome*) :

Kelancaran rutinitas pekerjaan kantor

f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 149.042.098,- (99,36%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 957.902,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 250 rim kertas kop dinas, 50 dos kop amplop, 232.000 lembar foto copy, 640 lembar kartu dosir, 1.000 lembar kartu pengawasan, 2.000 lembaran disposisi, 100 exp kalender duduk dan bahan lainnya.

Hasil (*Outcome*) :

Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dalam kurun waktu 1 tahun

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 40.583.370' - (81,17%) dan fisik 100%. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 9.416.630,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 370 buah lampu philips 18 watt, 270 buah lampu TL Neon 40 watt , dan bahan pendukung instalasi lainnya.

Hasil (*Outcome*) :

Tingkat kecukupan penerangan kantor dalam kurun waktu 1 tahun.

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 29.980.000,- (59,96%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 20.020.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 3 media cetak masing – masing sebanyak 17 eksemplar setiap hari dalam 1 tahun.

Hasil (*Outcome*) :

Menunjang akses informasi aparatur

i) Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 53.150.825,- (53,15%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 46.849.175,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dalam 1 tahun.

Hasil (*Outcome*) :

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat/pertemuan.

j) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 540.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 540.499.453,- dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 547,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

ASN mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi teknis bidang perhubungan sebanyak 41 kali di luar Maluku.

Hasil (*Outcome*) :

Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan di bidang Perhubungan

k) Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 973.440.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 963.792.000,- (99,01%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 9.648.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 30 orang Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran selama 1 tahun.

Hasil (*Outcome*) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp176.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 79.676.200,- (45,05%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 97.173.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

ASN dinas mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi teknis bidang perhubungan sebanyak 30 kali dalam Provinsi Maluku (Kabupaten/Kota).

Hasil (*Outcome*) :

Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan di bidang Perhubungan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan sarana dan prasarana aparatur, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- namun sampai akhir tahun kegiatan ini tidak terealisasi

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 108.746.000,- (87,00%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 16.254.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 5 unit PC komputer, dan 4 unit printer,

Hasil(*Outcome*) :

Tercukupinya fasilitas dan alat kerja aparatur Dinas Perhubungan Promal.

c) Pengadaan Mebeleur

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 148.850.000,- (99,23%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.150.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 1 buah kursi tamu rumah Jabatan , 1 buah tempat tidur, 1 set kursi dan meja makan di rumah jabatan, 1 set sofabed di ruangan pejabat, 1 set meja kerja pejabat, 1 buah kursi kerja pejabat, 2 buah kursi hadap depan meja kerja pejabat, 1 buah kursi tamu di ruangan pejabat dan 2 buah lemari dan arsip pejabat.

Hasil(Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor.

d) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 181.350.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 176.520.000,- (97,34%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp 4.830.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

1 unit gedung kantor terawat dengan baik.

Hasil(Outcome) :

Tersedianya gedung kantor yang nyaman sebagai tempat aparaturnya melaksanakan tugas.

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 450.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 309.118.184,- (68,69%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.140.881.816,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

8 unit kendaraan roda empat dan 23 unit kendaraan roda dua terawat dengan baik.

Hasil(Outcome) :

Memperpanjang masa pakai kendaraan dinas.

f) Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas Jabatan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- namun sampai akhir tahun kegiatan ini tidak terealisasi.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk menerapkan disiplin berpakaian yang benar bagi aparaturnya sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 60.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 60.192.000,- (99,00%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 608.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 76 buah pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Hasil (*Outcome*) :

Meningkatnya disiplin dan keseragaman aparatur.

b) Pengadaan Pakaian Lapangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- namun sampai akhir tahun kegiatan ini tidak terealisasi.

c) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 30.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 29.716.000,- (97,75%) dan fisik (100%), sehingga sisa anggaran sebesar RP. 684.000, Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 76 buah pakaian batik bagi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Hasil (*Outcome*) :

Meningkatnya disiplin dan keseragaman aparatur.

d) Pengadaan Pakaian Satpam dan Perlengkapannya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.500.000,- dan fisik (100%), Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 6 pasang pakaian satpam dan perlengkapannya

Hasil(Outcome) :

Meningkatnya disiplin dan keseragaman aparatur.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan perundang - undangan di bidang perhubungan, yang di implementasikan melalui kegiatan berikut :

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 39.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 36.458.246,- (93.01%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.741.754,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

3 orang aparatur dinas mengikuti Diklat dan Ujian Nasional Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, dan 1 ASN mengikuti Bimbingan Teknis dan Sertifikasi di sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Petugas K3 Konstruksi).

Hasil(Outcome) :

Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme aparatur.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan anggaran program dan kegiatan dinas, yang di implementasikan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.168.000,- (96,34%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.832.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya rancangan program kegiatan pembangunan dan pelayanan transportasi.

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan.

b) Forum SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 587.400.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 78.144.000,- (13,30%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 509.256.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

75 orang peserta Forum SKPD se Provinsi Maluku

Hasil (Outcome) :

Keselarasan dan harmonisasi kebijakan provinsi dan kabupaten/kota

c) Pengawasan Pembangunan Prasarana Perhubungan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 45.700.000,- (83,09%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 9.300.000,-. Capaian kinerja sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan laporan pengawasan.

Hasil (Outcome) :

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Lokasi Tambatan Perahu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 90.592.350,- (90,59%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 9.407.650,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

1 dokumen Perencanaan Lokasi Tambatan Perahu.

Hasil (*Outcome*):

Jumlah 5 kabupaten / kota SBB lokasi Piru, SBT lokasi Bula, Kep Aru lokasi Dobo, Kep Tanimbar lokasi Saumlaki dan MBD lokasi Tiakur yang sudah teridentifikasi kebutuhan tambatan perahu.

b) Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 39.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 18.286.400,- (46,53%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 21.013.600,-.Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*):

Telah dilakukan perjalanan Dinas ke Daerah Lokasi Tambatan Perahu di Dobo, namun hasilnya tidak bisa dilakukan sebab kebutuhan di Daerah lokasi hanya Jembatan Gantung.

Hasil (*Outcome*):

Tersedianya rujukan pelaksanaan pembangunan tambatan perahu.

c) FGD Bidang Transportasi Laut

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 43.588.000,- (87,18%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 6.412.000,-.Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*):

1 dokumen rekomendasi trayek angkutan laut perintis di Provinsi Maluku tahun 2021.

Hasil (*Outcome*):

Tersedianya dokumen rekomendasi trayek perintis di Provinsi Maluku.

d) Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Pelabuhan Laut

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 86.189.800,- (86,19%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 13.810.200,-.Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

1 dokumen di 10 Lokasi wonreli, Dobo, Saumlaki, Tual, Banda, Wahai, Namlea, Namrole, Leksula dan Ambon monitoring dan evaluasi pengoperasian pelabuhan laut regional.

Hasil (*Outcome*) :

Mewujudkan pelayanan pelabuhan regional yang optimal.

e) Monitoring dan Evaluasi Angkutan Laut Perintis, Pelra, PBM dan JPT

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 87.446.000,- (87,45%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 12.554.000,-.Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

6 dokumen Malteng, MBD, Saumlaki, Moa, Tual dan Ambon monitoring dan evaluasi pengoperasian perintis, Pelra, PBM dan JPT.

Hasil (*Outcome*) :

Mewujudkan pelayanan pelabuhan regional yang optimal

f) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Tambatan Perahu (Hutang TA 2019)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.302.074.634,- dengan realisasi keuangan Rp.288.752.136,- (95,59%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.13.322.498,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Terbayarnya hutang 2019 pembangunan fasilitas tambatan perahu lokasi wahai.

Hasil (*Outcome*) :

Terselesainya pembayaran hutang 2019 pembangunan fasilitas tambatan perahu

g) Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu (Hutang TA 2019)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 84.000.000,- namun sampai akhir tahun kegiatan ini tidak terealisasi.

h) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelabuhan Laut (Pembayaran Lanjut 2019)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.961.570.700,- dengan realisasi keuangan Rp 1.961.570.700 dan fisik 100%, Capaian kinerja sebagai berikut :

Keluaran (*Output*) :

Terbayarnya pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan aboru tahap 2

Hasil (*Outcome*) :

Terselesainya pembayaran lanjutan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan laut

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi jalan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Survei fasilitas keselamatan LLAJ

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.75.891.700,- (75,89%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 24.108.300,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya 1 dokumen Fasilitas Keselamatan LLAJ.

Hasil (*Outcome*) :

Sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan/pengadaan fasilitas keselamatan LLAJ di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah , Kabupaten Aru dan Kota Ambon.

b) Penegakan Disiplin AKDP

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 167.096.800,- (95,48%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 7.903.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam P. Ambon 56 unit Maluku Tengah 30 unit dan Maluku Tenggara 52 unit menjalani penertiban ijin trayek dan administrasi lainnya

Hasil (*Outcome*) :

Meningkatnya tertib perijinan trayek dan keselamatan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

c) Pengawasan Rutin Operasional AKDP

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 52.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 50.400.000,- (95,27%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam Kota Ambon menjalani penertiban ijin trayek dan administrasi lainnya pada tanggal 3 – 4 Maret 2020 sebanyak 102 unit, 16 – 18 April 2020 sebanyak 263 unit, 27, 28 dan 30 Agustus 2020 sebanyak 200 unit dan 9 -12 November 2020 sebanyak 127 unit.

Hasil (*Outcome*) :

Meningkatnya tertib perijinan trayek dan keselamatan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

d) Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada Supir/Juru Mudi/Awak Angkutan Umum Teladan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 80.450.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 55.794.553,- (69,35%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 24.655.447,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

1 Orang awak kendaraan umum teladan tingkat provinsi.

Hasil (*Outcome*):

Meningkatkan profesionalisme pengemudi angkutan umum.

e) Survey Loadfactor AKDP (on bus)

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 45.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 38.800.000,- (85,09%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 6.800.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*):

Tersedianya laporan hasil Survey di Kota Ambon sebanyak 1 dokumen

Hasil (*Outcome*):

Mewujudkan pelayanan angkutan Lalulintas yang optimal.

f) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 185.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 170.085.000,- (91,94%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 14.915.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*):

Terpasangnya 71 buah rambu lalu lintas pada ruas jalan Hunuth sampai Jazirah Leihitu P. Ambon.

Hasil (*Outcome*):

Tersedianya Fasilitas tuntunan, arahan dan batas area kepentingan bagi pengguna jalan raya.

g) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 116.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 109.700.000,- (94,57%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 6.300.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Terpasangnya 2.034 m Marka Jalan pada ruas Durian Patah dan Mangga Dua

Hasil (*Outcome*) :

Tersedianya fasilitas batas area kepentingan bagi pemakai jalan raya.

h) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 332.850.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 291.050.000,- (87,44%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 41.800.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Terpasangnya 184 m Pagar Pengaman Jalan pada ruas Mangga Dua dan Tantui.

Hasil (*Outcome*) :

Tersedianya fasilitas batas pengaman jalan bagi pemakai jalan raya.

i) Monitoring dan Evaluasi Hari-hari Besar Keagamaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 303.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 215.850.000,- (71,24%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 87.150.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Terkendalinya pelayanan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, angkutan Laut, dan angkutan udara yang tiba di P. Ambon dan berangkat dari P. Ambon dalam masa perayaan hari besar keagamaan Tahun 2020 (Lebaran/Natal/Tahun Baru).

Hasil (*Outcome*) :

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat Maluku dalam perayaan hari - hari besar keagamaan.

j) **Subsidi Pelayanan Angkutan**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 235.952.973,- (47,19%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 264.047.027,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (*Output*) :

Subsidi 7 unit bus angkutan massal Trans Amboina (BBM, service, dan penggantian suku cadang).

Hasil (*Outcome*) :

Mengoptimalkan pelayanan angkutan darat massal Trans Amboina.

8) **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) **FGD Bidang Transportasi Penyeberangan**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.400.000,- (12%) dan fisik 12%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 17.600.000,-. Capaian kinerja sebagai berikut :

Keluaran (*Output*) :

Terlaksananya pembayaran honor pembantu PPTK

Hasil (*Outcome*) :

Menunjang peningkatan kualitas pelayanan angkutan penyeberangan.

b) **Monitoring dan Evaluasi Kapal Penyeberangan milik Pemda dan Pemeriksaan SPM**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 72.989.600,- (97,32%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.010.400,-. Capaian kinerja sebagai berikut :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya laporan pemeriksaan SPM 7 unit armada angkutan penyeberangan di Seram Bagian Barat (PP. Waisala dan PP. Waipirit), Maluku Tengah (PP. Hunimua, PP. Wahai, PP. Waai, PP Waisala dan PP. Waipirit), Kabupaten Buru (PP. Namlea) dan Kabupaten Kep. Tanimbar (PP. Saumlaki).

Hasil (*Outcome*) :

Jumlah laporan hasil pemeriksaan prasarana penyeberangan.

c) Pemeriksaan Prasarana Penyeberangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 122.704.400,- (90.89%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 12.295.600,-. Capaian kinerja sebagai berikut :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya laporan pemeriksaan prasarana angkutan penyeberangan di 4 lokasi yaitu Kabupaten Maluku Tengah (Pel. Inamarina), Kabupaten Serab Bagian Timur (Pel. Kotasiri), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Pel. Saumlaki) & Kabupaten Kepulauan Aru (Pel. Lamerang).

Hasil (*Outcome*) :

Jumlah laporan hasil pemeriksaan prasarana penyeberangan.

9) Program Pengembangan Pelayanan Antar Moda Transportasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi antar moda maupun keselamatan transportasi antar moda, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Identifikasi/Inventarisasi Fasilitas Keselamatan.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 92.122.000,- (87,74%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 12.878.000,-. Capaian kinerja sebagai berikut :

Keluaran (*Output*) :

Tersedianya laporan hasil identifikasi fasilitas keselamatan angkutan speedboat

di Kabupaten Buru Selatan lokasi di Namrole dan Maluku Barat Daya lokasi di Tiakur.

Hasil (*Outcome*) :

Meningkatnya keselamatan transportasi.

b) Pengadaan Lifejacket dan Lifebuoy.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 228.850.000,- namun sampai akhir tahun kegiatan ini tidak terealisasi

c) Pengawasan Feeder Speedboat (Hutang TA 2019)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 39.508.125,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.234.600,- (61,34%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 15.273.525,-. Capaian kinerja sebagai berikut :

Keluaran (*Output*) :

Terbayarnya hutang pengawasan feeder speedboat Tahun 2019.

Hasil (*Outcome*) :

Menunjang mobilisasi masyarakat dan konektivitas antar pulau.

Penyebab keberhasilan/Kegagalan.

Faktor keberhasilan didukung oleh koordinasi yang baik dengan instansi terkait baik teknis maupun administrasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan kabupaten / kota.

Faktor hambatan dalam merealisasikan kegiatan antara lain :

- Terdapat kegiatan yang tidak terelisasi dikarenakan pemotongan anggaran/rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19.
- Untuk pekerjaan Pengadaan Life Jacket, Life Boy tidak dijalankan karena anggaran tidak mencukupi untuk Mendapatkan Life Jacket bersertifikat.
- Perlunya dukungan SDM Perhubungan yang berkualifikasi tertentu di provinsi maupun di kabupaten/kota terutama untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan perhubungan
- Terbatasnya dukungan pemerintah daerah bagi aparatur dinas untuk meningkatkan kapasitas melalui pendidikan lanjutan dengan spesifikasi bidang transportasi.
- Kebutuhan dokumen perencanaan yang cukup banyak, tidak berimbang dengan dukungan dana dan ketersediaan SDM.

- Untuk Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu (hutang 2019) tidak terealisasi di karenakan dari pihak ke 3 tidak memintakan pembayaran
- Melakukan evaluasi dan perencanaan dengan teliti dalam menyusun rencana anggaran sehingga pelaksanaan atau proses realisasi bisa dilakukan tepat waktu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku maka Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah *“Melaksanakan Urusan Otonomisasi Daerah di Bidang Perhubungan”*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Kedudukan

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku merupakan unsur pemerintah Provinsi Maluku yang menyelenggarakan urusan pemerintahan otonomi daerah dalam bidang Perhubungan.

Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomisasi Daerah di bidang Perhubungan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan program di bidang perhubungan sesuai Rencana Strategis Daerah /RPJMD;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
4. Pembinaan teknis di bidang perhubungan
5. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas;
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;
8. Pelaksanaan Kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi Dinas;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yang dituangkan dalam program kegiatan dinas.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2020

Capaian Kinerja Pehubungan Provinsi Maluku

No.	Indikator Kinerja	Kondisi sampai dengan tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	Terbangunnya Pelabuhan Penyeberangan	22 unit	2	-	-
2	Terbangunnya Pelabuhan Laut	65 unit	1	-	-
3	Terbangunnya Tambatan Perahu	19 unit	3	-	-
4	Terbangunnya Bandar Udara	13 unit	1	-	-
5	Terbangunnya Terminal		0	-	-
6	Terbangunnya Kapal Penyeberangan	26 unit	1	1	100%
7	Terbangunnya Kapal Laut	31 unit	1	5	100%
8	Penambahan AKDP		5	-	-
Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan					
1	Guardrail	184 m	1500 m	184 m	-
2	Rambu Lalin	71 buah	300	71 buah	-
3	Deliniator	-	500	-	-
4	Marka Jalan	2034,3	30.000	2034,3	100%
5	RPPJ	-	5	-	-
Tersedianya Jaringan Perintis					
1	LLAJ		31		
2	Penyeberangan	62 lintasan	67	65	100%
3	Laut	23 lintasan	23	23	100%
4	Udara	11 rute	11	11	100%

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Beberapa isu – isu penting strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah :

1. Peningkatan SDM aparatur yang handal dan kreatif.
2. Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan dan 92,4% merupakan wilayah lautan,

kabupaten / kota tersebar di pulau – pulau sehingga infrastruktur perhubungan mendapat peranan yang sangat penting untuk mendukung program pemerintah daerah maupun pusat antara lain :

- Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - Percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - Prioritas pembangunan pulau – pulau terluar / terdepan;
 - Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
3. Salah satu pilar untuk mewujudkan visi Pemerintahan Presiden Republik Indonesia adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim.
 4. Proses pelaksanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur Perhubungan membutuhkan pendanaan yang besar. Munculnya pandemi Corona Virus Desease 19 (Covid - 19) pada tahun 2020 memiliki pengaruh besar terhadap proses pengembangan dan pembangunan infrastruktur Perhubungan karena membutuhkan dana penanganan yang besar. Anggaran yang semesetinya diperuntukan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur Perhubungan beralih menjadi anggaran penanganan pandemi Corona Virus Desease 19 (Covid - 19).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pemerintahan Daerah Maluku periode 5 tahun dimana dalam tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sehingga rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan mengacu pada dokumen Rencana Strategis tahun 2019 – 2024.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap tahunnya, usulan program dan kegiatan disampaikan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang. Demikian pula pelaksanaan Rapat Kerja Teknis/Forum SKPD dilaksanakan untuk menampung dan membahas kebutuhan pelayanan sektor perhubungan yang ditampung dan ditindaklanjuti melalui pemerintah daerah maupun melalui pemerintah pusat dan dilaksanakan dengan pembiayaan APBN maupun APBD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu misi untuk mewujudkan visi Pemerintah adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Diturunkan dari misi tersebut menjadi agenda prioritas strategis nasional (Nawa Cita) antara lain Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan dan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Isu Prioritas RPJMN 2019 – 2024 yang berkaitan dengan pengembangan transportasi di Maluku adalah “Penguatan Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan”. Kebijakan utama dan prioritas pembangunan pemerintah pusat adalah :

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda dengan prioritas penguatan peran angkutan laut.
2. Meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk Kawasan Timur Indonesia, wilayah pedesaan, perbatasan, pedalaman dan wilayah terluar.
3. Pengembangan konektivitas untuk meningkatkan mobilitas perkotaan, mendukung pusat – pusat perekonomian nasional dan daerah dalam rangka pembangunan berkualitas.
4. Pengembangan terobosan skema pendanaan, DAK Transportasi dan perluasan pembiayaan jalan daerah.

Kesiapan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjadi hal yang sangat penting dalam menyambut Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai dokumen perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan yang terintegrasi, efisien dan komprehensif untuk mendorong percepatan tujuan pembangunan daerah.

Sasaran Renja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2022 mengacu pada sasaran Renstra :

1. Peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

3. Meningkatkan penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur menuju birokrasi yang bersih, berwibawa, kompeten dan melayani disertai peningkatan dan pemerataan sarana penunjang.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2022 yang disusun dalam program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada Visi - Misi Gubernur Maluku dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019 – 2024, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM,.

Rencana Program dan Kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan agar dapat dipakai untuk pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2022 ini. RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di Provinsi Maluku.

Rencana kerja organisasi perangkat daerah (RENJA OPD)
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
Tahun 2022

Urusan Pemerintah Daerah : Bidang Urusan Perhubungan

Nama OPD : Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)					(2)	(3)	(14)	(15)	(16)
2					<i>Urusan Wajib</i>				
2	15				Bidang Urusan Perhubungan			44,250,000,000	Dishub
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			22,714,000,000	Dishub
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,295,000,000	Dishub
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Forum SKPD, Rakernis Perhubungan dan Musrenbang	2 Dokumen	530,000,000	
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA dan Perubahannya	4 Dokumen	90,000,000	
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja SKPD	7 Dokumen	200,000,000	
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Perhubungan	2 Dokumen	475,000,000	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,250,000,000	Dishub
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7,150,000,000	
2	15	01	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Bulan	100,000,000	

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,000,000,000	Dishub
2	15	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	12 Bulan	500,000,000	
2	15	01	1.03	04	Pembinaan , Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah</i>	1 Dokumen	500,000,000	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,322,000,000	Dishub
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atributnya dan Pakaian Olahraga	1 Paket	375,000,000	
2	15	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	250,000,000	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Perhubungan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	475,000,000	
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pembinaan Keselamatan Transportasi, FGD Jaringan Perintis Udara dan Koordinasi Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Komersial Tahun 2023	4 Dokumen	1,222,000,000	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,360,000,000	Dishub
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	100,000,000	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	225,000,000	
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat atau kegiatan tidak terduga	12 Bulan	185,000,000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	150,000,000	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi rapat daerah dan luar daerah dan luar negeri	12 Bulan	1,700,000,000	

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,280,000,000	Dishub
2	15	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di adakan	1 Unit	500,000,000	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur yang diadakan	1 Paket	380,000,000	
2	15	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya yang diadakan seperti PC. Laptop, Printer, Audio Visual, Infocus, Drone dan Bataray Cadangan	1 Paket	900,000,000	
2	15	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan seperti pagar, penataan halaman rumah dinas, carpot dan lain - lain	1 Lokasi	500,000,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,983,000,000	Dishub
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan 3 paket	950,000,000	
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan/perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	100,000,000	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	1,888,000,000	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,074,000,000	Dishub
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Paket	774,000,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terawat	2 lokasi	300,000,000	

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan			2,150,000,000	Dishub
2	15	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Kapal penyeberangan untuk hari Pattimura, Ch.M.Tiahahu dan Operasional Kapal Siwalima	3 Kapal	2,150,000,000	
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			13,811,000,000	Dishub
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			10,650,000,000	Dishub
2	15	02	1.02	02	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan fasilitas keselamatan LLAJ, Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia di jalan provinsi seperti Rambu Lalu lintas, Pagar Pengaman jalan, Marka Jalan, Delineator, LPJU, Water Barrier dan Traffic Cone	3 Dok 6 Paket	10,600,000,000	
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang terlaksana	1 Dok	50,000,000	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			410,000,000	Dishub
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan tingkat provinsi	100 orang	210,000,000	
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan forum Lalulintas yang terlaksana	1 Dok	200,000,000	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			300,000,000	Dishub
2	15	02	1.06	02	Peningkatan kapasitas penilaian andalalin	Jumlah personil yang mengikuti diklat peningkatan SDM Perhubungan	12 Orang	200,000,000	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen penilaian hasil andalalin yang tersedia	2 Dok	100,000,000	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			501,000,000	Dishub
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah dokumen Monev terminal penumpang tipe B yang tersedia	2 Dok	250,000,000	
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah peserta abdhayasa teladan	50 Orang	151,000,000	

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	<i>Jumlah laporan hasil ramp check</i>	3 Dok	100,000,000	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1,650,000,000	Dishub
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hari-hari besar keagamaan yang tersedia</i>	3 Dok	500,000,000	
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan pengawasan Ketersediaan angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar Kota Dalam satu daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan penegakkan disiplin dan pengawasan yang terlaksana serta Jumlah Bus yang tersubsidi dan pengawasan yang terlaksana</i>	6 bus 1 dokumen	1,150,000,000	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi			300,000,000	Dishub
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah dokumen survey load factor AKDP yang tersedia</i>	1 Dok	300,000,000	
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran			7,725,000,000	Dishub
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			350,500,000	Dishub
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan laut Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Usulan Trayek Perintis Angkutan Laut Provinsi Maluku Tahun 2023</i>	1 Dok	350,500,000	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			12,400,000	Dishub
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat serta Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Rakyat Kewenangan Provinsi</i>	1 Dok	12,400,000	

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten /Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			150,000,000	Dishub
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Dokumen Usulan Jaringan Penyeberangan Perintis Maluku Tahun 2023 yang terbentuk	1 Dok	150,000,000	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			850,000,000	Dishub
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil survey load factor angkutan penyeberangan	1 Dok	300,000,000	Dishub
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	Jumlah dokumen pemenuhan standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan dan pengawasan terhadap kapal - kapal milik pemda Provinsi Maluku	2 Dok	550,000,000	Dishub
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			27,100,000	
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait, Bongkar Muat Barang dan Jasa Pengurusan Transportasi	1 Dok	27,100,000	

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			550,000,000	
2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah sosialisasi tentang batas-batas pengertian dan kewenangan pihak penyelenggara pelabuhan pengumpan regional sesuai dengan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sehingga terbentuk sinkronisasi pemahaman di kalangan masyarakat pengguna jasa di pelabuhan maupun masyarakat yang berdomisili dan beraktivitas di sekitar pelabuhan pengumpan regional</i>	5 Pelabuhan Regional	550,000,000	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			950,000,000	Dishub
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah dokumen studi Pra FS Pelabuhan Laut di wilayah Teon, Nila, Serua</i>	1 Dok	500,000,000	
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah dokumen hasil pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan hasil pemeriksaan kondisi prasarana pelabuhan pengumpan regional</i>	2 Dok	450,000,000	
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			4,650,000,000	Dishub
2	15	03	1.10	01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu provinsi	<i>Jumlah dokumen pemeriksaan prasarana pelabuhan penyeberangan yang terlaksana</i>	5 Dok	250,000,000	
2	15	03	1.10	02	Pembangunan Pelabuhan sungai dan danau yang melayani Trayek lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	<i>Jumlah dokumen perencanaan dermaga penyeberangan tersusun</i>	6 Dok	4,200,000,000	
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen pengawasan prasarana penyeberangan</i>	3 Dok	200,000,000	

Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Keluaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			95,000,000	Dishub
2	15	03	1.11	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin BUP PT.PELINDO IV Cabang Banda	1 Dok	95,000,000	
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			90,000,000	
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha pengoperasian terhadap pelayanan kapal di pelabuhan yang melayani selama 24 jam	1 Dok	90,000,000	
JUMLAH								44,250,000,000	

Ambon, Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU**



Dr. MOHAMMAD MALAWAT, ST, MT
Pembina Tingkat. I
NIP. 19721029 199803 1 002